



---

## **Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur: Studi Kualitatif Di Kampung Klawarren Distrik Wemak Kabupaten Sorong**

**Ade Andriani Renouw<sup>1</sup>, Edward Clan<sup>2</sup>, Rendi Yudhistira Pattiasina<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Papua

e-mail: [gracerenouw@gmail.com](mailto:gracerenouw@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Kampung Klawarren Distrik Wemak Kabupaten Sorong menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan, dan kapasitas aparatur desa. Selain itu, ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur belum merata dan masih membutuhkan peningkatan perencanaan serta pengawasan. Dengan demikian, dana desa berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi optimalisasinya memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.

**Kata kunci:** Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Desa, Manajemen Pembangunan

### **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of village funds on infrastructure development in Klawarren Village, Wemak District, Sorong Regency, using a qualitative approach. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The informants in this study consist of village officials, community leaders, and residents who are directly involved in the implementation of village development. The results of the study indicate that village funds play a significant role in promoting infrastructure development, such as road construction, provision of clean water, and other public facilities. However, the effectiveness of their utilization is still influenced by several factors, including budget limitations, community participation, transparency in management, and the capacity of village officials. In addition, it was found that infrastructure development has not been evenly distributed and still requires improved planning and supervision. Therefore, village funds contribute significantly to infrastructure development, but their optimization requires synergy between the village government and the community*

**Keywords:** Village Funds, Infrastructure Development, Rural Development, Management Development

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat serta menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan pembangunan. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, khususnya dalam aspek infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, serta kesempatan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan secara konsisten lebih tinggi

dibandingkan dengan wilayah perkotaan, yang mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan yang belum terselesaikan secara optimal.

Infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas, produktivitas, serta akses masyarakat terhadap layanan publik (World Bank, 2017). Di tingkat desa, ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai katalisator aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.

Sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembiayaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Pengelolaan dana desa diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak yang optimal (Kementerian Keuangan, 2020).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran hubungan antar variabel secara statistik. Pendekatan ini cenderung belum mampu menjelaskan secara mendalam proses implementasi kebijakan di tingkat desa serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat (Sugiyono, 2018). Selain itu, aspek penting seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan kendala dalam pengelolaan dana desa seringkali kurang mendapat perhatian, padahal faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa (Adisasmita, 2013).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kualitatif untuk memahami secara lebih komprehensif fenomena pemanfaatan dana desa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, makna, serta pengalaman yang terjadi dalam masyarakat (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penelitian dilakukan di Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur melalui dana desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa program seperti pembangunan jalan desa dan penyediaan air bersih masih belum merata, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan.

Secara konseptual, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan prakarsa masyarakat (Widjaja, 2008). Desa tidak hanya sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki kemandirian dalam mengelola potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasinya, dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pengalokasian dana desa ditetapkan berdasarkan beberapa indikator, yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, kemudian ke Rekening Kas Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana desa secara efektif dan tepat sasaran.

Penggunaan dana desa diarahkan pada dua bidang utama, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pembangunan, dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pengembangan usaha ekonomi, dan dukungan terhadap Badan Usaha Milik Desa.

Pembangunan desa merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rosalinda

(2014) yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Infrastruktur berfungsi sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas. Dalam konteks wilayah timur Indonesia, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mengurangi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Renouw, 2019).

Keberhasilan pembangunan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, manfaat bagi masyarakat, dan keberlanjutan (Adisasmita, 2013). Transparansi mencerminkan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, partisipasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa, manfaat menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat, dan keberlanjutan menekankan pentingnya dampak jangka panjang dari pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek pengelolaan, partisipasi masyarakat, maupun kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong berlangsung, termasuk proses pengelolaannya, tingkat partisipasi masyarakat, serta berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dan sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait proses, kendala, serta persepsi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat langsung maupun yang merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, arsip desa, laporan penggunaan dana desa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pengelolaan dana desa, pelaksanaan pembangunan, serta persepsi masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang telah dibangun serta aktivitas masyarakat yang terkait dengan pemanfaatannya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen resmi, foto kegiatan, serta catatan administratif yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan dalam memahami temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dalam data.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipercaya dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi yang diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan desa, penyediaan air bersih, serta pembangunan fasilitas umum lainnya yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dana desa mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa (Ilmiawan et al., 2024).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, terutama pada pembangunan jalan dan penyediaan air bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah dialokasikan, efektivitas pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa meskipun dana desa berkontribusi terhadap pembangunan, dampaknya masih bervariasi antar wilayah akibat perbedaan kapasitas dan tata kelola (Anam et al., 2023).

Dari aspek pengelolaan, penelitian ini menemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal. Informasi terkait penggunaan dana desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan, transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas tata kelola, khususnya transparansi fiskal, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi dana desa (Meiyenti et al., 2025).

Selain transparansi, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih terbatas. Masyarakat cenderung hanya menjadi penerima manfaat, bukan sebagai subjek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam pembangunan desa belum sepenuhnya terimplementasi. Penelitian lain juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembangunan berbasis dana desa, karena mampu meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program (Afifah & Rodiyah, 2024).

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan dana desa di Kampung Klawaren secara umum telah mengikuti aturan yang berlaku, namun masih terdapat keterbatasan dalam pelaporan dan pengawasan. Aparatur desa masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas administratif dan teknis dalam mengelola dana desa secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan dana desa (Adam et al., 2024).

Selain itu, manfaat pembangunan yang dilakukan melalui dana desa telah dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Pembangunan jalan desa mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan penyediaan air bersih meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dana desa berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan (Sambas & Saputro, 2024).

Namun demikian, dari aspek keberlanjutan, pembangunan yang dilakukan masih menghadapi tantangan. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun belum memiliki sistem pemeliharaan yang baik, sehingga berpotensi mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selain itu, perencanaan pembangunan jangka panjang masih belum optimal, sehingga program pembangunan cenderung bersifat jangka pendek. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kapasitas administrasi, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (Asta et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur desa, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai

faktor, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kapasitas aparatur desa, serta perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan program dana desa lebih ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia (Zahran & Mursyidah, 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek sosial, kelembagaan, dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih merata, efektif, dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa di Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan yang dilakukan melalui dana desa telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas dasar seperti jalan dan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa merupakan instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan di tingkat desa.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan pembangunan, di mana beberapa wilayah belum sepenuhnya merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun. Selain itu, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana secara efektif.

Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan dana desa pada dasarnya telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal pelaporan dan pengawasan agar lebih optimal. Sementara itu, dari aspek keberlanjutan, pembangunan yang dilakukan masih belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan jangka panjang dan sistem pemeliharaan yang baik, sehingga berpotensi mengurangi manfaat infrastruktur dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur melalui dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan mengimplementasikan program pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa, diperlukan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu didorong secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berorientasi jangka panjang, serta didukung dengan sistem pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta didukung oleh tata kelola yang baik, diharapkan pemanfaatan dana desa dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifah, N., & Rodiyah, I. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 18(2), 120–135. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v18i2.1343>
- Anam, K., Sari, D., & Putra, R. (2023). Village fund and rural development: Evidence from Indonesia. *Journal of Regional Development Studies*, 15(1), 45–60. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase penduduk miskin di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fadlon, F., Rahman, A., & Putri, S. (2023). Efektivitas pembangunan infrastruktur pedesaan melalui dana desa. *Teras Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.29103/tjts.v13i1.1215>
- Fatem, T., & Kusmiady, M. E. (2024). Implementasi pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Administrasi Publik*, 6(1), 25–38. <https://doi.org/10.30598/jppap.v6i1.3751>
- Fujeri, N. M., & Asmara, A. (2024). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 25(1), 77–90. <https://doi.org/10.21002/jepi.v25i1.159086>
- Ilmiawan, D., Putri, R., & Kurniawan, A. (2024). Dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(2), 101–115. <https://doi.org/10.61292/jpd.v10i2.9300>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Buku saku dana desa*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kesuma, F. T., & Muhtaj, M. E. (2024). Analisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.59818/jshp.v8i1.5350>
- Renouw, A. A. (2019). *Pembangunan berbasis masyarakat di Papua*. Jayapura: UKIP Press.
- Rochdati, M. C., & Achyani, F. (2023). Dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2), 210–220. <https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.18007>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- World Bank. (2017). *Infrastructure for development*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0996-8>
- Yasir, A. (2023). Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. *Cross-Border Journal of Business Management*, 5(2), 89–102. <https://doi.org/10.37567/cbjbm.v5i2.3591>
- Yulianti, K., Kahar, A., & Jurana. (2022). Praktik good governance dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 7(1), 33–47. <https://doi.org/10.55927/jeki.v7i1.8>